

STUDI ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA YANG BERBASIS SYARI'AH DI DESA PANDAN INDAH, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

¹ Fatmawati, S.E., M.M., ² Eka Nurmayanti. M.E.K., ³ Karmila

¹² Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Qamarul Huda, Bagu

Email : luluqfatmawati@gmail.com, ³ kkarmi751@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berbasis syari'ah, apa saja kendala yang dihadapi BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berbasis syari'ah dan Apa solusi BUMDES dalam mengatasi masalah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis syari'ah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yaitu metode induktif. Dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat Desa pandan Indah, baik itu pendapatan, pengeluaran dan kesejahteraan masyarakat Desa pandan indah, namun pada kenyataannya setelah Berdirinya Badan Usaha Milik Desa di Desa pandan Indah pada akhir 2017 lalu belum dapat maksimal di rasakan oleh masyarakat Desa pandan indah secara keseluruhan. Bahwa peran BUMDES Desa Pandan indah pada dasarnya sudah mencoba untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa pandan indah dengan asas dasar hukum syariah baik secara materi maupun non materi, bahwa manusia akan di katakan sejahtera apabila dari unsur kebutuhan primer (*al-dhururiyyah*) dan kebutuhan skunder (*al-hajiyyah*) maka sudah di katakana sejahtera dalam islam,

Kata Kunci: Peran Bumdes, Ekonomi Syariah, Kebutuhan Primer, Kebutuhan Skunder

Abstract

This study focuses on the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDES) in boosting the village economy based on Sharia principles, the obstacles faced by the BUMDES in this endeavor, and the solutions implemented to overcome these challenges. The study employs a descriptive-analytical qualitative approach, utilizing observation, interviews, and documentation for data collection. An inductive method is used for data analysis. While the economic development of the Pandan Indah village community—in terms of income, expenditure, and general welfare—is a key consideration, the reality is that the benefits of the BUMDES, established in late 2017, have not yet been fully realized by the community as a whole. Nevertheless, the Pandan Indah BUMDES has essentially endeavored to develop the local economy based on Sharia principles—encompassing both material and non-material aspects

grounded in the Islamic concept that well-being is achieved when both primary needs (al-dhururiyyah) and secondary needs (al-hajiyyah) are met.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat.¹ Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang dibentuk berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan oleh Pemerintah semisal LKMD, PKK, Klompencapir, Kelompok Tani dan lembaga kemasyarakatan lainnya, sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta di berlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional²

Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern.

Dengan berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintahpun mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibuat pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan pembangunan itu sendiri dari pada pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional.

Fenomena tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan tradisional yang demikian ini adalah bukan hanya merupakan sebuah kebetulan saja, akan tetapi sudah menjadi realita umum di dalam masyarakat. Dimana masyarakat desa ternyata lebih memilih bergabung dan aktif menjadi anggota lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).³

¹Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika aditama, 2005). hlm,45.

²Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, hal.75

³Abdul Basith. *"Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah"*. (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2012). Hlm 60.

Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa.⁴

Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).⁵

Harapan Pemerintah Kabupaten lombok tengah yaitu adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes di setiap desa yang ada di Kabupaten lombok tengah belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lombok tengah kepada Pemerintah Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes.⁶ Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti peranan BUMDes didalam pemberdayaan masyarakat desa dengan judul “Studi analisis terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berbasis syari’ah(studi kasus BUMDes desa pandan indah).

Adapun penelitian ini berfokus pada Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berbasis syari’ah, apa saja kendala yang dihadapi BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berbasis syari’ah dan Apa solusi BUMDES dalam mengatasi masalah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis syari’ah?

LANDASAN TEORI

1. Definisi peranan

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁷ Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: “Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila

⁴Hikmat Kusumaningrat. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2009). hlm 98.

⁵Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayaan...*, hlm,31.

⁶Data Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa, hlm, 26.

⁷Seyadi. 2003. *BUMDes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta UPP STM YKPN, hlm, 23.

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”⁸

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:⁹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.¹⁰ *Falah*, kehidupan yang mulia dan sejahtera didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Syathibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*annafs*), intelektual/akal (*al-aql*), keluarga dan keturunan (*an-nasl*),

⁸Soerjono Soekanto dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 28.

⁹Atmojo, Singgih Tri. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Kasus Pada BUMDes di Desa Temurejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi, Jember: Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Jember. 2015.

¹⁰Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009,

dan material (*al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan mutlak harus dipenuhi agar manusia hidup bahagia didunia dan diakhirat. Jika salah satu kebutuhan diatas tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.¹¹

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan peneliti akan memfokuskan pengumpulan data atau informasi tentang peran BUMDES Desa Pandan Indah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pandan Indah yang berbasis syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yaitu metode induktif.

Metode induktif yaitu cara menganalisis data atau teori-teori yang bersifat khusus ke umum. Dengan metode ini penulis mencoba mengambil suatu kesimpulan, serta menganalisis data atau teori-teori yang penulis temukan yang bersifat khusus untuk kemudian memberikan gambaran global dari apa yang penulis temukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak kebijakan pemerintah untuk kemakmuran masyarakat kecil yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi perdesaan. Lembaga perekonomian yang berbasis pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

BUMDES Desa Pandan Indah memiliki tujuan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pandan Indah, walaupun pada saat ini belum di rasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal, tetapi walaupun perannya masih rendah paling tidak mampu memberikan pendapatan tambahan dan mengurangi angka pengangguran di Desa Pandan Indah.

Dalam islam kesejahteraan tidak hanya di ukur dari sisi materi tetapi juga dari non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral. Dalam islam juga membagi kebutuhan manusia menjadi tiga bagian yaitu :

¹¹Ibid..., hlm 107.

a. *Al-dharuriyah* kebutuhan primer

Kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan kehidupan manusia, masyarakat Desa Pandan Indah sudah masuk dalam katagori kebutuhan ini karena 99% masyarakat Desa Pandan Indah percaya kepada tuhan yang maha esa.

b. *Al- Hajiyyah* kebutuhan skunder

Kebutuhan yang di butuhkan oleh manusia untuk memudahkan kehidupanya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang baik terhadap kehidupan manusia, BUMDES Desa pandan Indah sudah hadir dalam kebutuhan skunder ini dengan di kembangkannya unit-unit usaha yang ada untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya.

Dari sisi sosial respon masyarakat terhadap adanya BUMDES Desa Pandan Indah masih tergolong lemah, karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlalu tau tentang adanya BUMDES di Desa Pandan indah.

Masalah perekonomian merupakan hal yang menjadi momok dalam penyelenggaraan pembangunan Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional hingga daerah terlebih di wilayah pedesaan. Berbagai upaya telah dan terus diupayakan dalam upaya mengatasi persoalan masalah perekonomian, bahkan sejak adanya masalah perekonomian itu sendiri.

Namun banyak persoalan yang menjangkit perdesaan dimana permasalahan itu saling berkaitan satu sama lain sehingga, ada kecenderungan masyarakat di perdesaan sulit keluar dari permasalahan masalah perekonomian. Kondisi ini diperparah kurang maksimalnya upaya, pemerintah pusat, daerah dan tentunya desa serta masyarakatnya untuk benar-benar berupaya mencari jalan keluar dari masalah perekonomian tersebut. Sehingga lama-kelamaan masalah perekonomian tersebut semakin parah dan bertambah, sebab akar permasalahan serta solusi yang dicanangkan belum sepenuhnya menyentuh masalah perekonomian itu sendiri.

Masalah perekonomian kini menjadi suatu identitas yang melekat dengan perdesaan seperti warisan yang diterima turun-temurun. Sehingga tidak heran, banyak penduduk desa yang mengadu nasib baik di kota atau menjadi tenaga kerja di luar negeri dalam upayanya untuk memperbaharui taraf hidup keluarganya. Selain kurangnya perhatian pemerintah, banyak persoalan lain yang berkontribusi terhadap merebaknya masalah perekonomian, diantaranya: (1) tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah; (2) rendahnya asset yang dikuasai masyarakat perdesaan; (3) pelayanan sarana dan prasarana pedesaan kurang memadai; (4) terbatasnya kesempatan melakukan usaha di perdesaan; (5) lemahnya pembangunan berbasis masyarakat dan (6) lemahnya koordinasi dalam pembangunan perdesaan itu sendiri.

Implikasi logis keadaan tersebut akan bermuara pada kenyataan bahwa bukan perkara mudah bagi pemerintah dalam upayanya mengentaskan masalah perekonomian, jika masyarakat sendiri terkesan enggan merubah kehidupannya. Dalam beberapa kasus, ada kecendrungan masyarakat dalam kategori miskin semakin apatis menjalani hidup, karena berharap banyak dari sumbangan langsung yang terus diberikan oleh pemerintah dan pihak lain. Menyadari hal

tersebut pemerintah (daerah dan desa) seharusnya dapat membuat terobosan dalam penanggulangan masalah perekonomian sesuai dengan karakter dan potensi daerah/desa masing-masing dan tidak menunggu intervensi program penanggulangan masalah perekonomian dari pemerintah semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di kemukakan diatas skripsi ini membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa pandan indah yang berbasis syariah, dari permasalahan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat Desa pandan Indah, baik itu pendapatan, pengeluaran dan kesejahteraan masyarakat Desa pandan indah, namun pada kenyataannya setelah Berdirinya Badan Usaha Milik Desa di Desa pandan Indah pada akhir 2017 lalu belum dapat maksimal di rasakan oleh masyarakat Desa pandan indah secara keseluruhan.

Bahwa peran BUMDES Desa Pandan indah pada dasarnya sudah mencoba untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa pandan indah dengan asas dasar hukum syariah baik secara materi maupun non materi, bahwa manusia akan di katakan sejahtera apabila dari unsur kebutuhan primer (*al-dhururiyyah*) dan kebutuhan skunder (*al-hajiyyah*) maka sudah di katakana sejahtera dalam islam, dengan adanya BUMDES Desa pandan indah yang betujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa pandan Indah maka kesejahteraan itu sudah terlaksana walaupun belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayaan Rakyat*, Bandung: PT Refika aditama , 2005
- Abdul Basith. “*Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*”. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2012
- Hikmat Kusumaningrat. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2009
- Data Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
- Seyadi. *BUMDes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta UPP STM YKPN, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Abdul Rahman, , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Atmojo, Singgih Tri. “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Kasus Pada BUMDes di Desa Temurejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Banyuwangi*”. Skripsi, Jember: Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Jember. 2015.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), EkonomiIslam, Jakarta: Rajawali Press, 2009.